



UNMIT/Tim Investigasi Kejahatan Berat (SCIT) Newsletter Issue 7 Maret 2011

SCIT-UNMIT
Obrigado Barracks II
Caicoli
DILI

Phone: 330-4100
Fax: 330-4110

SCIT di Kabupaten
BAUCAU: UNMIT, Vila Nova
MALIANA: UNMIT, Holsa Soso
SUAI: UNMIT, Debos
OCUSSE: KANTOR UNMIT
ERMERA: Administrasi Kabupaten

Informasi lebih lanjut
Hubungi: Júlia Galvão Alinho
Pegawai Hubungan Luar
Mob: +670 73 11 519
E-mail: alinho@un.org

Investigasi 1999
membantu peradilan di
Timor-Leste

[www.unmit.org/rule_of_law/
serious_crimes_investigation
team](http://www.unmit.org/rule_of_law_serious_crimes_investigation_team)

• Pada bulan Februari, Parlemen akan melanjutkan perdebatan tentang undang-undang tentang reparasi untuk korban pelanggaran hak asasi manusia (1974-1999) dan mendirikan "Institut Memory" untuk melaksanakan rekomendasi dari dua komisi kebenaran CAVR dan KKP. Sekelompok anggota parlemen mengajukan permohonan untuk menunda perdebatan sampai kompensasi untuk veteran diselesaikan

• Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa dan Pemukiman (WGEID) mengunjungi Timor-Leste dari tanggal 07-14 Februari

Diantara kesimpulan mereka: "tanpa peradilan pidana yang efektif untuk kejahatan berat tidak ada perdamaian abadi"

• Dewan Keamanan PBB bertemu bulan Februari dan memutuskan untuk memperpanjang mandat UNMIT sampai Februari.

Tanya & Jawab



Jika saya memberikan pernyataan kepada CAVR, apakah SCIT akan menyelidiki kasus ini?

Sampai dengan tahun 2005, semua kasus Kejahatan Berat yang dilakukan tahun 1999, seperti, pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, yang dilaporkan kepada Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR dalam bahasa Portugis singkatan) diteruskan kepada Unit Kejahatan Berat dulu di Kantor Jaksa Agung Timor-Leste untuk penyidikan dan penuntutan konsekuen, dalam hal ada cukup bukti. Kasus kurang serius diselesaikan melalui Proses Rekonsiliasi Komunitas yang diselenggarakan oleh CAVR.

Jika saya berbicara dengan penyidik SCIT, atau Jaksa, akankah orang lain dapat membaca pernyataan saya?

Pasal 75 dari Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa proses pidana hanya menjadi publik setelah surat dakwaan diajukan ke pengadilan dan bahkan kemudian, akses ke dokumen dalam berkas perkara tunduk pada kewenangan pengadilan. Selama penyelidikan hanya penyidik dan jaksa memiliki akses ke file. Juga hakim saat memutuskan tentang isu tertentu misalnya penahanan pra-sidang memiliki akses untuk bukti yang mendukung klaim tersebut. Setelah surat dakwaan diajukan, hakim pengadilan memiliki akses penuh ke file. Pelaku, pembelanya serta orang yang diperburuk dapat meminta salinan catatan lanjutan. Jaksa (selama investigasi) atau hakim (selama persidangan) dapat memberikan wewenang itu jika berada dalam kepentingan keadilan. (pasal 77). Orang-orang ini, serta panitera pengadilan yang menangani file tersebut diwajibkan oleh hukum untuk menjaga rahasia mereka. Hukum Timor-Leste - KUHP, pasal 74 - menjamin bahwa "Setiap peserta prosedural dan setiap orang, dalam kapasitas apapun, dalam kontak dengan melanjutkan dan menjadi tahu, di seluruh atau sebagian, dengan konten daripadanya, tidak diperbolehkan untuk membuatnya publik". Selain itu jika saksi takut untuk memberikan pernyataan, ia selalu bisa menginformasikan polisi atau jaksa dalam permintaan untuk perlindungan, di bawah Undang-Undang Perlindungan Saksi No. 2 / 2009.

Dapatkah saya menolak untuk memberikan pernyataan pada SCIT, jika saya menyaksikan kejahatan pada tahun 1999?

Menurut hukum Timor-Leste - KUHP, Pasal 279 - siapapun memberikan pernyataan palsu atau menolak untuk memberikan pernyataan bisa diadili untuk kejahatan obstruksi keadilan dan dijatuhi hukuman penjara sampai 5 tahun.

Setelah saya memberikan pernyataan kepada penyidik, apakah saya masih harus pergi ke pengadilan dan mengatakan hal yang sama?

Ya, menurut hukum Pengadilan harus mendengar saksi. Pasal 266 dari Kode Prosedur Pidana mengatakan bahwa "pendapat Pengadilan hanya dapat didasarkan pada bukti yang telah baik diproduksi atau diperiksa di sidang". Ini berarti saksi harus pergi ke pengadilan, juga untuk memungkinkan penuntutan, pertahanan dan hakim untuk mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, jika diperlukan, pemerintah akan membantu saksi dengan menyediakan transportasi, akomodasi dan/atau makanan untuk memungkinkan orang untuk memenuhi warga tugas mereka.

Apa yang akan terjadi setelah SCIT menyimpulkan penyelidikan?

Setiap kali SCIT menyelesaikan penyelidikan dalam kasus, ia mengirimkan semua bukti yang dikumpulkan tentang kasus dan rekomendasi kepada Kantor Jaksa Agung. OPG kemudian akan menganalisa kasus dan memutuskan apakah ada cukup bukti untuk mengajukan dakwaan ke pengadilan atau untuk menutup kasus tersebut. Setelah SCIT menyelesaikan semua investigasi kejahatan berat tahun 1999, Tim ini akan ditutup, dalam desain saat ini. Namun Timor-Leste memiliki kerangka hukum dan institusi untuk menindaklanjuti pekerjaan ini.

SCIT info

UNMIT/Tim Investigasi Kejahatan Berat (SCIT) Newsletter Issue 7 Maret 2011

Menerima informasi tentang hukum, hal yang baik untuk perdamaian



UNMIT Photo/Julia Alinho

Dari tahun 2009 dan akhir 2010, UNMIT Tim Investigasi Kejahatan Berat (SCIT) dengan bantuan Unit Hak Asasi Manusia dan Keadilan Transisional dan Unit Dukungan Pemerintahan Demokratis melakukan program penyuluhan di 62 dari 65 kecamatan di Timor-Leste. Sebanyak 9,481 orang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan termasuk pemutaran film CAVR "Jalan Menuju Perdamaian" (7518 orang) dan pertemuan masyarakat menyangkut demokrasi dan hukum. Peserta mengharapkan program tersebut dapat diperluas di tingkat desa karena "dengan adanya informasi tentang hukum dapat mencegah terjadinya konflik".

Tujuan utama dari program penyuluhan adalah untuk meningkatkan kesadaran mengenai dukungan UNMIT kepada lembaga-lembaga Timor-Leste dalam upaya mereka untuk memperkuat sistem peradilan, meningkatkan akuntabilitas bagi pelanggaran hak asasi manusia, untuk mendirikan sebuah program penggantian rugi (reparasi) bagi korban dan mempromosikan tata pemerintahan yang baik.

Kami juga menjelaskan kerangka hukum dan prosedur. Kami menjawab beberapa pertanyaan dan mengumpulkan pertanyaan dari masyarakat tentang kasus-kasus tertentu yang sedang diselidiki oleh SCIT. Mitra luar dari UNMIT diundang untuk berpartisipasi. Beberapa Organisasi seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Sekretariat Pos-CAVR, Komisaris lama KKP dan NGO CTI juga ikut serta di beberapa kecamatan. Total 7,518 orang yang menonton film "Jalan Menuju Perdamaian" dan 1,963 orang ikut serta dalam rapat penyuluhan.

Peserta memberikan reaksi positif tentang inisiatif ini, oleh karena itu mereka merekomendasikan untuk diperluas di tingkat desa. "Orang perlu tahu lebih banyak tentang hukum dan hak-hak mereka, hal ini dapat mencegah konflik", kata Inacia dos Santos di Nain Feto, Dili. "UNMIT juga harus mengundang anggota partai politik dan wakil pemerintah untuk datang membicarakan masalah ini", kata Gregorio Santos di Liquica. Departemen Kehakiman dan Pengadilan Tinggi memberikan salinan 460 KUHP yang didistribusikan kepada Kepala Desa, agen PNTL dan para guru.



SCIT bekerja atas petunjuk dan supervisi dari Kantor Jaksa Agung Timor-Leste

Editorial:

Dalam edisi 2011 pertama bulletim kami, kami bangga memberitahu anda tentang program penyuluhan yang kami selenggarakan tahun lalu, untuk menjelaskan pekerjaan dan masalah lain terhadap masyarakat, bahkan di daerah terpencil. Kami berterima kasih kepada para Camat Kecamatan serta Komisi Hak Asasi Manusia, atas dukungan dan kerjasama serta menyediakan dokumen dan berpartisipasi dalam pertemuan. Kami senang untuk memberikan kehormatan kepada kedua organisasi yang mewakili para korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia. Kami juga menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta selama pertemuan.

**Marek Michon
Kepala SCIT**

Komite 12 November dalam pencarian korban pembantaian Santa Cruz

"Keluarga memiliki hak untuk mengetahui apa yang terjadi pada keluarga mereka yang lain", kata Gregorio Saldanha. Tugas Komite 12 November adalah untuk mendaftarkan dan menyeleksi korban Santa Cruz untuk menerima medali dan bantuan kemanusiaan. Sejak tahun 2008, Komite 12 November sebagai organisasi non-pemerintah, telah melakukan banyak upaya dalam mencari, membantu penggalan kembali jenazah dan mengembalikan sisa-sisa jasad korban kepada keluarga mereka.

Pada tanggal 12 November 1991, Saldanha adalah salah satu pemimpin Asosiasi Pemuda Timor-Leste (OJETIL) yang mengorganisir dan berpartisipasi dalam demonstrasi Pro-Kemerdekaan di Kuburan Santa Cruz, Dili. Dengan adanya keterlibatan pihak militer Indonesia mengakibatkan kematian bagi puluhan orang dan juga penangkapan termasuk penangkapan terhadap Saldanha.

Dia diadili untuk peranannya dalam organisasi demonstrasi dan mendapat hukuman Penjara Seumur Hidup oleh Pengadilan Indonesia. Pada tahun 1999, setelah menghabiskan delapan tahun di penjara Cipinang Jakarta, Saldanha kembali ke Timor-Leste dan memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi pada semua rekan-rekannya setelah Pembantaian Santa Cruz. Dalam waktu delapan tahun, ia membentuk sebuah tim untuk mendaftarkan para korban, tidak hanya yang terbunuh, tetapi juga para korban yang selamat".

Komite telah mendaftarkan sebanyak 2.261 orang yang berpartisipasi pada demonstrasi 12 November 1991. Dari mereka, 74 orang telah diidentifikasi tewas pada hari tersebut dan 127 orang telah meninggal kemudian karena beberapa penyebab. Ini daur jumlah korban yang masih hidup sebanyak 2060. "Tapi angka dapat berubah, karena kami masih menerima informasi baru" kata Saldanha.

Berdasarkan pendaftaran tersebut, Komite 12 November merekomendasikan untuk dekorasi kepada para peserta demonstrasi. Sebanyak 969 orang telah menerima medali dari Negara. Komite juga membuat rekomendasi kepada Pemerintah untuk bantuan kemanusiaan kepada korban yang berada dalam kebutuhan yang lebih besar.

Kami juga menyadari kebutuhan para keluarga korban untuk mencari orang hilang. Jadi, kami membentuk Komite Keluarga



Orang Hilang ". Hal ini menjadi salah satu misi paling penting dari Komite 12 November. Tahun 2008, Komite mendapat dukungan dari tim Forensik Internasional dari Australia dan Argentina, untuk mencari dan menggali sisa-sisa korban. "Kami melakukan penggalian pertama di Tibar, mendapat hasil yang baik", kata Saldanha. Ketika Komite menerima permintaan dari keluarga, mereka akan menghubungi tim forensik yang sudah mendapat izin dari Pemerintah dan Jaksa Agung untuk melakukan pekerjaan ini. Komite membantu mereka dalam melakukan penggalian itu. Ia menambahkan bahwa polisi juga diinformasikan agar bisa mengamankan pada saat proses penggalian.

Pekerjaan Komite dibatasi hanya untuk para korban Santa Cruz. Saldanha sangat positif tentang prospek Parlemen menyetujui undang-undang baru mengenai reparasi untuk semua korban dan membentuk lembaga baru bermandat untuk untuk mencari para korban konflik tahun 1974-1999.

Mengenai proses peradilan, Saldanha mengatakan: "Kami tidak menentang pengadilan, tetapi tugas kami, prioritas kami adalah untuk memperoleh informasi tentang keberadaan para korban. Ini adalah masalah yang sangat sensitif, karena harus mencari informasi. Hal ini sangat kompleks. Kita harus menemukan keseimbangan ". Dengan kerjanya, Komite 12 November mencoba untuk membawa beberapa bantuan dan kenyamanan kepada keluarga korban dan memulihkan martabat mereka. Saldanha menjelaskan: "Orang memiliki hak untuk dimakamkan di tempat yang tepat; dan keluarga berhak mendapat informasi tentang keberadaan keluarga mereka yang hilang ".

Augusto Pires, Presiden Asosiasi Korban dan Keluarga korban kekerasan hak asasi manusia—konflik tahun 1974-1999

"Korban merasa bahwa keadilan belum dilayani"

Asosiasi korban nasional didirikan pada September 2009 untuk mengadvokasi kepentingan korban pelanggaran hak asasi manusia selama periode 1974-1999. Augusto Pires, dipilih oleh wakil dari 13 Kabupaten untuk memimpin Asosiasi, menjelaskan bahwa tujuan utama Asosiasi adalah berjuang demi keadilan, dalam arti lebih luas, karena "korban merasa bahwa keadilan belum dilayani".

Bagaimana ide ini muncul untuk mendirikan Asosiasi ini?

Ide ini datang dari masyarakat, khususnya para korban yang merasa terisolasi di desa dan kecamatan. Mereka telah menuntut keadilan dan reparasi (penggantian rugi) dari pihak berwenang dan menyalurkannya melalui asosiasi lokal dan kabupaten serta organisasi. Jadi ide ini kami kumpulkan bersama dan kami mencari mitra nasional dan internasional serta donor. Asosiasi HAK dan ICTJ (International Center for Transitional Justice) memberikan tanggapan positif dan mereka membantu kami membuat Kongres Nasional Korban Pelanggaran HAM 1974-1999 pada bulan September 2009. Selama kongres ini, kami membentuk Asosiasi Korban Nasional Timor-Leste.

Apa tujuan utama dari Asosiasi ini?

Tujuan utama dari Asosiasi ini adalah memperjuangkan keadilan. Sampai hari ini, korban dan keluarga korban tidak merasakan tercapainya keadilan dalam arti lebih luas. Inilah yang mendorong kami untuk membentuk asosiasi ini, untuk meminta kepada Pemerintah Timor-Leste menjamin keadilan yang layak bagi semua keluarga yang menderita selama konflik dan perjuangan kemerdekaan.

Apa yang Asosiasi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut?

Untuk mencapai tujuan ini, *pertama* kami harus memperkuat organisasi kami dan mengkonsolidasikannya sampai ke tingkat kecamatan. Kami akan mempersiapkan rencana advokasi dan kemudian memulai dialog dengan Pemerintah Timor-Leste untuk menerapkan program reparasi bagi korban seperti uang, monumen, dan reparasi secara kolektif seperti beasiswa dan fasilitas kesehatan kepada masyarakat yang paling terkena dampak. Kami ingin mencapai tujuan ini dalam lima tahun ke depan dan kami optimis karena Parlemen sedang membahas dua undang-undang baru mengenai hal ini. Perjuangan kami untuk keadilan juga mencakup *lobi* dengan demikian anggota keluarga dapat mengetahui dimana jasad orang yang mereka cintai berada. Untuk saat ini, sebagian besar keluarga tidak tahu dimana jasad korban berada, ada yang dimakamkan di kuburan yang tersembunyi, dan yang lain dibawa ke wilayah Indonesia. Ini sebabnya kami meminta Pemerintah Timor-Leste untuk membantu keluarga korban untuk menemukan jasad orang yang mereka cintai. Selain itu, masih banyak pelaku Kejahatan Berat berjalan dengan bebas di bagian perbatasan negara. Ini semua harus



diselesaikan. Hal ini yang keluarga korban inginkan dalam waktu singkat. Inilah yang kita sebut keadilan.

Dapatkah Anda menjelaskan bagaimana Asosiasi anda inginkan tentang 'diselesaikan'? Apa yang anda sebut keadilan?

Membawa pelaku ke pengadilan. Itulah yang kita sebut sebagai keadilan. Kita membutuhkan keadilan yang layak. Barang siapa yang membunuh atau membantai orang, keadilan harus memutuskan. Jika pengadilan mengatakan bahwa tindakan mereka hasil dari keadaan perang, kita akan menerimanya. Tapi, jika pengadilan mengatakan bahwa mereka harus bertanggung jawab, mereka layak mendapatkan hukuman tertentu, menurut hukum, maka itulah yang harus dilakukan. Saya pikir ini benar-benar normal, membiarkan sistem peradilan memutuskan. Itulah yang kami tuntut untuk masa depan.

Pada bulan Maret 2010, Anda hadir ketika hukuman diberikan pada anggota mantan milisi Mahidi, disidangkan di Pengadilan Dili. Apa yang Anda rasakan saat itu?

Saya pikir ini sangat baik bahwa keadilan dilakukan dengan cara ini, karena mereka melakukan kejahatan dan layak mendapatkan hukuman. Ini sangat penting dan inilah yang Timor-Leste minta. Apa yang membuat saya merasa kurang puas saat hukuman tidak diterapkan dengan cara yang sama dalam kasus Maternus Bere, yang telah dibebaskan. Ia dituduh melakukan kejahatan berat, bagaimana bisa Timor-Leste, suatu Negara yang tunduk akan hukum, membebaskan Maternus Bere dan mengijinkannya pergi ke Indonesia? Kami memahami kebutuhan untuk menjalin persahabatan yang erat antara Timor-Leste dan Indonesia. Saya pikir, bagaimanapun, bahwa membela keadilan juga mempertahankan persahabatan, karena Maternus Bere seharusnya tidak dibebaskan, ia seharusnya diberi kesempatan untuk diadili di pengadilan Timor-Leste.